

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Meratapi Nasib Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Ekonomi

- Perang Nilai Tukar dan Rupiah ■
- Plus-Minus "Uang Panas" ■

Politik

- BUMN: antara Entitas Ekonomi dan Politik ■
- Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri: Anggaran vs Faedah ■
- Menata Ulang Koalisi: Golkar Keluar, PDI-P Masuk, Mungkinkah? ■

Sosial

- Manajemen Penanganan Bencana ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Meratapi Nasib Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	2
EKONOMI	
Perang Nilai Tukar dan Rupiah	7
Plus-Minus “Uang Panas”	9
POLITIK	
BUMN: antara Entitas Ekonomi dan Politik	11
Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri: Anggaran vs Faedah	14
Menata Ulang Koalisi: Golkar Keluar, PDI-P Masuk, Mungkinkah?	17
SOSIAL	
Manajemen Penanganan Bencana.....	20
PROFILE INSTITUSI.....	23
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN	24
ADVERTORIAL INDONESIA 2009.....	26

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
 Aly Yusuf, Antonius Wiwan Koban, Hanta Yuda AR., Nawa Poerwana Thalo

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Masyarakat Indonesia merasakan keprihatinan mendalam terhadap nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menderita penganiayaan bahkan tewas mengenaskan di luar negeri. Pada November 2010, setidaknya dua penganiayaan luar biasa terjadi pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia. *Yang pertama*, Sumiati Salan Mustapa (23 tahun), asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Madinah, Arab Saudi, mengalami luka di tubuh, wajah, dan kaki akibat penyiksaan termasuk dugaan luka pada bibir akibat digunting oleh majikannya. *Yang kedua*, Kikim Komalasari (36 tahun), yang juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga, diduga dibunuh setelah sebelumnya diperkosa, dan tubuhnya ditemukan di tong sampah di Abha Asir, Arab Saudi.

Dua peristiwa memilukan itu membuat masyarakat meratapi nasib TKI terutama TKW di luar negeri, yang banyak menderita penganiayaan di negara tempatnya bekerja. Serta merta, dua kejadian mengenaskan ini menyibak kembali gunung es penderitaan TKI/TKW di luar negeri. Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran asal Indonesia kembali digugat. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang meratapi nasib Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang ekonomi, politik dan sosial. Bidang ekonomi mengangkat tema tentang perang nilai tukar dan rupiah, juga tema mengenai plus minus uang panas. Bidang politik mengangkat tema tentang BUMN: antara entitas ekonomi dan politik, lalu tema mengenai kunjungan kerja DPR ke luar negeri: anggaran vs faedah. Tema lainnya tentang menata ulang koalisi: Golkar keluar, PDI-P masuk, mungkinkah? Di bidang sosial mengangkat tema mengenai prosedur manajemen penanganan bencana.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Meratapi Nasib Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Masyarakat Indonesia merasakan keprihatinan mendalam terhadap nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menderita penganiayaan bahkan tewas mengenaskan di luar negeri. Pada November 2010, setidaknya dua penganiayaan luar biasa terjadi pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia.

Yang pertama, Sumiati Salan Mustapa (23 tahun), asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Madinah, Arab Saudi, mengalami luka di tubuh, wajah, dan kaki akibat penyiksaan termasuk dugaan luka pada bibir akibat digunting oleh majikannya. Yang kedua, Kikim Komalasari (36 tahun), yang juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga, diduga dibunuh setelah sebelumnya diperkosa, dan tubuhnya ditemukan di tong sampah di Abha Asir, Arab Saudi. Dua peristiwa memilukan itu membuat masyarakat meratapi nasib TKI terutama TKW di luar negeri, yang banyak menderita penganiayaan di negara tempatnya bekerja. Serta merta, dua kejadian mengenaskan ini menyibak kembali gunung es penderitaan TKI/TKW di luar negeri. Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran asal Indonesia kembali digugat.

Respon Pemerintah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, ditugaskan untuk melihat langsung kondisi Sumiati korban penganiayaan itu. Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, ditugaskan menangani hal-hal teknis perlindungan lebih lanjut terhadap korban. Presiden SBY berinisiatif TKI yang dipekerjakan di luar negeri akan disediakan lebih

banyak telepon seluler. Ini untuk mengatasi kendala komunikasi antara TKI dengan pejabat di sana yang menanganinya. Ini mengundang kritik dari pemerhati tenaga kerja migran, dipertanyakan apakah Presiden mengerti inti permasalahannya. Solusi *handphone* bagi TKI di luar negeri dinilai sebagai langkah yang tidak strategis dan tidak menjawab inti permasalahan.

Yang menjadi masalah sebetulnya penegakan hukum melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fasilitas *handphone* hanya alat bantu, walaupun akan dicantumkan dalam nota kesepahaman dengan negara penempatan, apabila pasal-pasal prinsip perlindungan pekerja migran di luar negeri tidak ditegakkan maka majikan dapat sewenang-wenang dan hak pekerja migran tidak terjamin, termasuk hak untuk berkomunikasi. Yang menjadi keprihatinan pula adalah kegagalan pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dalam melindungi pekerja migrannya di luar negeri. Ini sudah terjadi tidak hanya dengan negara Arab Saudi, namun juga dengan Malaysia. sebagai negara penempatan TKI/TKW. Sikap tawar (*bargaining*) pemerintah Indonesia lemah sehingga membiarkan diri sebagai pengekspor tenaga kerja murah berupa TKI/TKW tanpa mampu menuntut jaminan perlindungan pekerja migrannya. Di dalam negeri, Pemerintah dikecam kegagalan melindungi TKI/TKW setiap kali terjadi kasus TKI/TKW pulang ke Indonesia sudah berupa mayat atau tubuh penuh luka akibat penganiayaan di tempat bekerja di luar negeri.

Terkait penyiksaan pekerja migran di Arab Saudi, seperti disuarakan oleh Amnesty International untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, dikatakan bahwa yang juga menjadi akar masalahnya adalah kegagalan pemerintah negara-negara Timur Tengah untuk menegakkan hak-hak pekerja rumah tangga yang berasal dari kalangan perempuan migran. Sehubungan itu, peran diplomasi Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan TKI/TKW seharusnya mendesak dijaminnya hak-hak dan perlindungan pekerja migran asal Indonesia.

Akumulasi masalah

Masalah derita dan perlindungan TKI/TKW migran asal Indonesia di negara penempatannya telah bertahun-tahun ini menjadi masalah yang terakumulasi. Hingga tahun 2010, tidak kurang dari 6 juta warga negara Indonesia yang mengadu nasib sebagai pekerja migran di luar negeri. Sebagian terbesar yaitu 80 persen adalah perempuan dan 70 persen dari TKW Indonesia bekerja sebagai pembantu

rumah tangga. Arab Saudi menjadi negara tujuan penempatan TKI terbesar di kawasan Timur Tengah. Sementara Malaysia menjadi negara tujuan penempatan TKI terbesar di kawasan Asia Pasifik. Untuk negara penempatan Arab Saudi, setiap tahunnya tidak kurang 80 ribu TKI diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi. Saat ini diperkirakan tidak kurang dari satu juta orang Indonesia bekerja sebagai TKI/TKW di Arab Saudi.

Migrant Care hingga awal tahun 2010 mencatat 2.878 TKI mengalami kekerasan di seluruh negara penempatan. Sementara kematian TKI di luar negeri setidaknya 215 orang meninggal ketika bekerja di Arab Saudi dan 683 orang di Malaysia. Menurut Amnesty International, perempuan pekerja migran yang pergi ke Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah banyak mengalami pelecehan dan eksploitasi. Ini sesuai temuan Migrant Care tentang tipologi masalah TKI di negara-negara penempatan. Tipikal masalah yang dialami oleh TKI di Malaysia adalah legalitas pekerja, di Hongkong mayoritas adalah upah rendah; di Taiwan banyak gaji TKI tidak dibayar dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak; di Singapura TKI banyak terjebak dalam rekrutmen untuk penyelundupan (*smuggling in person*); dan di Arab Saudi TKI terutama TKW banyak mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual.

Akumulasi masalah TKI di luar negeri sudah menjadi benang kusut yang menjerumuskan TKI tanpa upaya perbaikan yang sistematis. Akumulasi masalah semakin menumpukkan problem tak kunjung habis, disebabkan mulai dari faktor kualitas sumber daya manusia TKI yang minim dibanding pekerja migran negara lain (misalnya kemampuan bahasa Inggris dan ketrampilan mengoperasikan perkakas rumah tangga modern, bila dibandingkan pekerja migran Filipina); tingkat kecerdasan calon TKI yang diberangkatkan dari pedesaan di daerah kantong-kantong pengirim tenaga kerja migran di Indonesia; pengetahuan dan wawasan calon pekerja migran tentang hak dan kewajiban pekerja dan hubungan antara majikan dan pekerja; ditambah faktor psikologis pekerja migran yang berasal dari pedesaan yang cenderung lugu tidak berani bersikap asertif kepada majikan dan agen penempatan atau agen pengirim tenaga kerja.

Selain faktor-faktor masalah dari internal sumber daya manusia TKI/TKW tersebut di atas, akumulasi masalah ditambah lagi dengan kebijakan dan diplomasi tenaga kerja murah oleh Pemerintah Indonesia. Sejak bertahun-tahun, TKI dijadikan komoditas oleh Pemerintah Indonesia untuk menghasilkan devisa bagi negara.

Dengan dalih mengatasi pengangguran di dalam negeri, sejak bertahun-tahun Pemerintah Indonesia membuka keran seluas-seluasnya bagi pengiriman TKI/TKW ke luar negeri. Setiap tahunnya, jumlah remitansi (kiriman uang dari TKI yang bekerja di luar negeri) memang meningkat. Tahun 2004, jumlah remitansi dari pekerja migran Indonesia adalah 1,866 milyar dollar AS. Tahun 2005 meningkat empat kali lipat menjadi 5,420 milyar dollar AS. Tahun 2008 menjadi 6,794 milyar dollar AS dan tahun 2009 menjadi 6,793 milyar dollar AS. Pada tahun 2010 ini diperkirakan jumlah remitansi meningkat menjadi 7,139 milyar dollar AS.

Akumulasi masalah derita TKI diperburuk dengan ulah para calo dan agen serta birokrat yang diduga sudah menjadi mafia yang mengambil manfaat dari eksploitasi pengiriman TKI. Pungutan melebihi tarif resmi untuk biaya administrasi dokumen, biaya pelatihan, biaya pengiriman, yang pada akhirnya dibebankan kepada setiap TKI menambah beban derita TKI/TKW. Tidak sedikit masalah upah tidak dibayar dikarenakan agen dan majikan berdalih bahwa gaji yang menjadi hak TKI ditahan karena untuk melunasi semua biaya-biaya yang terjadi ketika proses pengiriman dan penempatan TKI. Posisi tawar TKI yang lemah ditambah faktor psikologis yang tidak berdaya mengkritisi calo, agen, dan majikan sering membuat TKI terjebak dalam eksploitasi kerja tanpa dibayar.

Minimnya pengetahuan dan keterampilan TKI sering membuat hubungan TKI dan majikan menjadi tegang. Majikan sering menyiksa TKI bermula dari kesalahan kerja TKI. Kendala salah komunikasi karena TKI tidak dapat berbahasa Inggris, sementara tidak ada jaminan pula bahwa majikan juga mampu berbahasa Inggris, semakin memperparah hubungan TKI dan majikan. Ditambah dengan minim bahkan tidak adanya kontrak kerja yang melindungi pekerja rumah tangga, menambah kecenderungan majikan untuk dapat berlaku sewenang-wenang hingga kejam di luar kemanusiaan kepada TKI yang bekerja di tempatnya. Nasib TKW menjadi semakin parah ketika kekerasan dan penganiayaan ditambah dengan kekerasan dan pelecehan seksual.

Rekomendasi

Langkah kebijakan yang harus dilakukan antara lain:

- (1) Pemerintah tidak lagi menerapkan kebijakan pengiriman tenaga kerja upah murah sebanyak-banyaknya ke luar negeri sebagai komoditas untuk pemasukan devisa.
- (2) Kemnakertrans menghentikan pengiriman TKI yang tidak lulus sertifikasi ketrampilan kerja.
- (3) Pemberdayaan sumber daya manusia di pedesaan dan perkotaan dengan pendidikan ketrampilan kerja dan pendidikan masyarakat mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja.
- (4) Pemberdayaan sektor-sektor padat karya di pedesaan dengan upaya menarik investasi asing masuk desa, sehingga bukan masyarakat di pedesaan yang berbondong-bondong pergi ke luar negeri menjadi tenaga kerja murah.
- (5) Pemerintah menegakkan diplomasi dan posisi tawar yang melindungi pekerja migran Indonesia di negeri penempatan TKI.

Kebijakan pengiriman tenaga kerja upah murah sebanyak-banyaknya ke luar negeri harus dihentikan. Pemberdayaan sektor-sektor padat karya di pedesaan dengan upaya menarik investasi asing masuk desa, sehingga bukan masyarakat di pedesaan yang berbondong-bondong pergi ke luar negeri menjadi tenaga kerja murah.

— **Antonius Wiwan Koban** —

Perang Nilai Tukar dan Rupiah

Perang nilai tukar terus berlanjut. Sengketa yang awalnya hanya melibatkan AS -melalui dolar AS- dan China –melalui yuan- melebar kemana-mana. Yen Jepang misalnya, terus menguat terhadap dolar AS. Penguatan semakin teras ketika isu perang kurs berhembus di komunitas internasional.

Bagi perekonomian yang bergantung pada ekspor seperti Jepang, penguatan Yen (“Yendaka”) jelas membawa bencana. Bank of Japan tentu tidak akan melepas Yen kepada mekanisme pasar. Intervensi di pasar valuta asing menjadi pilihan paling rasional di tengah keterbatasan instrumen kebijakan moneter.

Pelemahan Dolar AS

Sengketa AS-China seputar nilai tukar sebenarnya sudah berlangsung lama. Ketegangan memuncak ketika AS menderita “pertumbuhan tanpa lapangan pekerjaan” (*jobless growth*). Daya serap tenaga kerja perusahaan-perusahaan di AS lemah. Tingkat pengangguran pun tidak kunjung turun meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat.

Para pengambil kebijakan AS menganggap bahwa lemahnya daya serap itu sendiri terjadi karena produk-produk buatan manufaktur AS di pasar domestik kalah bersaing dengan produk-produk buatan China. AS menganggap bahwa unggulnya produk buatan China lebih disebabkan oleh perilaku pemerintah China yang melakukan manipulasi nilai tukar. Akibatnya, AS menderita defisit neraca perdagangan dalam jumlah yang sangat mengkhawatirkan.

Pemerintah AS tentu berjuang memperlemah dolar AS. Salah satunya ialah melalui instrumen *quantitative easing*, yakni sebuah langkah kebijakan yang dilakukan bank sentral AS The Fed dengan membeli surat utang yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan negara Paman Sam tersebut.

Di satu sisi, langkah tersebut bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi AS. Dengan diborongnya surat utang Pemerintah, maka Pemerintah akan memiliki dana untuk melakukan ekspansi fiskal. Di sisi lain, langkah tersebut akan membuat suplai dolar bertambah. Sesuai hukumnya, jika terjadi pertambahan pasokan uang, maka nilai tukar uang tersebut akan melemah. Jika nilai tukar menurun, ekspor akan meningkat.

Rupiah

Rupiah tidak luput dari fenomena global ini. Sebagaimana yang terjadi dengan Yen –serta mata uang negara-negara sekawasan seperti Baht Thailand, Ringgit Malaysia, Dolar Singapura dan Peso Filipina- Rupiah menguat *vis-a-vis* dolar AS. Namun, dibandingkan dengan berbagai mata uang tersebut, rupiah mengalami penguatan yang paling kecil.

Mengenai penguatan rupiah, ada dua hal yang perlu diluruskan tentang pandangan kebanyakan orang saat ini. *Pertama*, banyak orang cenderung menganggap bahwa kurs yang terus menguat merupakan hal positif. Ini tidak sepenuhnya benar.

Sektor bisnis membutuhkan kurs yang stabil, bukan yang terus menerus menguat atau melemah. Kurs yang stabil dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk meningkatkan investasinya.

Kedua, di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa kurs yang terus menguat berdampak negatif bagi ekonomi. Pandangan seperti ini hanya melihat Indonesia sebagai eksportir. Dalam kenyataannya, dalam bisnis internasional, Indonesia tentu juga berperan sebagai importir.

Terlebih, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Indonesia didominasi oleh barang-barang modal dan bahan mentah yang tentu saja diperlukan untuk proses produksi.

Dengan demikian, kurs yang menguat akan membuat harga barang-barang modal dan bahan mentah menjadi lebih murah, sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah.

— Nawa Poerwana Thalo —

Sektor bisnis membutuhkan kurs yang stabil, bukan yang terus menerus menguat atau melemah.

Plus-Minus “Uang Panas”

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia terus dibanjiri aliran uang panas, yakni uang yang masuk ke dalam berbagai bentuk instrumen finansial, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Uang panas akan terus membanjiri sistem keuangan Indonesia selama: *Pertama*, kondisi ekonomi domestik baik. *Kedua*, negara-negara maju tengah berjuang dalam proses pemuliahan dengan menjalankan kebijakan tingkat bunga yang rendah (sehingga tidak menarik bagi investor) di tengah besarnya hutang publik. Kemungkinan besar kedua hal tersebut akan terus terjadi paling tidak selama satu tahun ke depan. Dengan kata lain, uang panas akan terus membanjiri Indonesia.

Plus

Pertama, secara teoritis –yang didukung oleh bukti empiris– mengalirnya likuiditas ke instrumen keuangan membuat tingkat bunga menjadi rendah. Suku bunga yang rendah akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Bagi Indonesia, suku bunga merupakan masalah serius. Dibandingkan negara-negara sekawasan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan memiliki tingkat bunga tertinggi. Hal ini jelas mengurangi daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan di negara-negara sekawasan.

Bagi pemerintah, larisnya surat utang negara jelas membuat beban bunga yang harus dibayarkan Indonesia menjadi lebih ringan.

Minus

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa –sesuai dengan namanya– uang panas menciptakan kekhawatiran. Ketika kondisi ekonomi memburuk, kepercayaan terhadap instrumen keuangan domestik

melemah, aliran uang panas akan tiba-tiba berbalik arah, meninggalkan Indonesia. Selanjutnya, nilai tukar melorot tajam dan menciptakan kepanikan di sistem finansial.

Menimbang plus-minus

Trauma terhadap pembalikan arah secara mendadak, sejumlah ekonom menyerukan agar Bank Indonesia (BI) menerapkan kendali terhadap aliran uang panas tersebut, seperti yang dilakukan oleh Brasil dan Thailand.

Namun, rekomendasi kebijakan sebaiknya mengacu pada kondisi ekonomi domestik, tidak langsung meniru langkah yang diambil oleh negara lain, yang bisa jadi memiliki kondisi berbeda.

Indonesia masih membutuhkan pasar finansial yang “booming”. Karena dengan demikian, akan tercipta kesan bahwa sektor riil memiliki akses yang besar terhadap pendanaan dari pasar modal.

Salah satu faktor yang membuat industri mobil Jepang untuk membangun pabrik di India adalah karena kinerja pasar modalnya yang baik. Dengan demikian, kinerja pasar modal yang positif memberikan manfaat bagi sektor riil. Artinya, kedua sektor tersebut tidak sama sekali terpisah.

Lagipula, pemerintah kita sangat membutuhkan beban bunga yang murah dari surat utang yang diterbitkan untuk mendanai berbagai sektor penunjang pertumbuhan.

Mengenai pembalikan arus uang panas, apakah hal itu akan terjadi dalam waktu dekat? Setelah Yunani dan Irlandia, kita belum tahu negara lain di zona Eropa yang akan terimpa masalah. Kalaupun pembalikan arus uang panas itu terjadi, apakah rupiah akan kembali anjlok seperti krisis global 2008 lalu?

Perlu kita ingat bahwa kemampuan BI untuk menjaga nilai rupiah kini sudah berlipat ganda ketimbang 2008 lalu. Ini terlihat dari cadangan devisa kita yang terus menggunung.

Pemerintah kita sangat membutuhkan beban bunga yang murah dari surat utang yang diterbitkannya untuk mendanai berbagai sektor penunjang pertumbuhan.

— **Nawa Poerwana Thalo** —

BUMN: antara Entitas Ekonomi dan Politik

Dari masa ke masa, perjalanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sebuah bisnis entitas tidak pernah mulus selalu ada faktor ikutan lain yang menjadi penentu maju mundurnya bisnis tersebut. Faktor dominan yang memberikan pengaruh yang signifikan adalah politik. Turbulensi politik terus menerus memporak porandakan setiap upaya pembenahan BUMN. Akibatnya, manajemen BUMN kehilangan energi dan kelincahannya di dunia bisnis, sehingga kalah bersaing dengan swasta dan perusahaan asing di negeri sendiri.

Sedangkan di era global, BUMN Indonesia masih berada jauh di banding dengan BUMN milik negara lain, walaupun ada hanyalah bagian kecil dari kesuksesan yang ada. BUMN Indonesia tampil canggung, perlu banyak penyesuaian dengan kondisi pasar global yang berkembang, tidak seperti BUMN di Malaysia, Singapura atau negara Asia daratan.

BUMN Indonesia masih terpasung oleh intervensi politik dan peran tidak wajar negara yang memacu berbagai kelompok kepentingan dengan latar belakang yang berbeda baik sosial kultural maupun kepentingan untuk berlomba lomba memburu secara terus menerus berbagai hasil dari kegiatan BUMN baik dalam bentuk kebijakan, program, benda fisik maupun anggaran.

Dari sekian banyak masalah BUMN yang menjadikan mismanajemen dalam pengelolaannya, terdapat dua hal pokok: *pertama*, masalah kedudukan BUMN yang strategis di dalam perekonomian nasional, karena asetnya besar dan mencakup berbagai bidang ekonomi yang diperlukan masyarakat. Meski demikian, banyak BUMN mengalami kerugian dan dalam stagnasi yang panjang dalam pengelolaannya. Hal ini pula yang menyebabkan kebanyakan BUMN mengalami kesulitan maju dan berkembang setara dengan badan usaha swasta dan modern lainnya.

Kedua, masalah struktural institusional mendasar yang membuat BUMN tidak berdaya, meskipun dikirim pimpinan yang berkualitas.

Faktor internalnya dipengaruhi dan campur aduk dengan faktor eksternal. Padahal jika dikelola secara modern dan profesional seperti itu seharusnya tidak ada.

Upaya menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis modern dan profesional telah dilakukan sejak masa Presiden Soeharto. Akan tetapi, kebanyakan BUMN tetap seperti wajahnya yang lama dengan kinerja seperti biasanya pula. Sebagian besar perusahaan perusahaan berpelat merah tersebut dikelola dengan pola ekonomi politik feodal, dimana kekuasaan raja-raja kecil di departemen sangat mempengaruhi badan usaha tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian tampil sebagai presiden menggantikan Megawati berusaha membenahi BUMN melalui menternya Sugiharto dan Sofyan Djalil. Namun lagi-lagi, BUMN menjadi instrumen kekuasaan politik di pusat kekuasaan. BUMN masih mengakomodasi kepentingan politik daripada mengakomodasi fungsi sebagai badan bisnis modern dan profesional.

Salah satu kebijakan yang menjamin berlangsungnya proses ini adalah Instruksi Presiden No 8 Tahun 2005, yang memberikan peranan besar kepada tim *ad hoc* diluar menteri untuk bisa berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dengan berbagai pihak dalam kerangka pembenahan secara internal maupun eksternal dari manajemen BUMN itu sendiri.

Selain itu, Instruksi Presiden tersebut cenderung meletakkan BUMN sebagai organisasi birokrat dibawah kekuasaan pemerintah. Padahal, BUMN adalah organisasi ekonomi, sedangkan pemerintah adalah institusi politik. Hubungan yang paling ideal bagi keduanya adalah hubungan tidak langsung, seperti diatur oleh Undang Undang Perseroan Terbatas melalui rapat umum pemegang saham, bukan melalui penunjukan politik.

Meskipun perkembangan BUMN hingga saat ini masih jauh dari yang diharapkan tapi ada beberapa BUMN yang benar-benar potensial menguntungkan bagi negara, baik dari besarnya deviden maupun pajak. Disitu pemerintah meski menjaga kepemilikan yang signifikan. Dari lebih seratus BUMN, kelompok yang profitable ini bisa di hitung dengan jari. Sebagai contoh sebut saja Telkom, Bank Mandiri, BNI, BRI, Garuda dan beberapa lainnya.

Beberapa BUMN ini mengalami reformasi internal sehingga semakin lama semakin tampil sebagai organisasi bisnis yang modern. Bahkan,

Telkom mengamali proses evolusi, Bank Mandiri dan BNI sudah *go public*. Garuda sudah menjadi bagian penerbangan internasional yang disegani meskipun baru baru ini mengalami permasalahan teknis yang menyebabkan sistem layanan bagi penerbangan konsumen terganggu.

Meskipun demikian, ada catatan yang harus diperhatikan bahwa beberapa BUMN bank yang mengalami keuntungan masih menerima obligasi dari dana rakyat, pajak, atau APBN. Beberapa BUMN yang untung juga masih berada dalam pasar yang masih belum bersaing secara sehat atau pasar monopoli oligopoli. Keuntungannya tidak bisa diklaim sebagai hasil dari kerja manajemen karena ada ganjalan penopang obligasi dari uang rakyat dan APBN.

Kesimpulan akhir yang menegaskan pemerintah mengklaim bahwa BUMN sudah menjadi entitas modern melalui serangkaian perubahan kebijakan dalam penentuan direksi dan pola kerjanya belum sepenuhnya benar karena pada prakteknya pemerintah seringkali berbelok tergantung kondisi kepentingan yang berkembang.

— Aly Yusuf —

Kesimpulan akhir yang menegaskan pemerintah mengklaim bahwa BUMN sudah menjadi entitas modern melalui serangkaian perubahan kebijakan dalam penentuan direksi dan pola kerjanya belum sepenuhnya benar karena pada prakteknya pemerintah seringkali berbelok tergantung kondisi kepentingan yang berkembang.

Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negri: Anggaran vs Faedah

Kunjungan kerja DPR RI sejauh ini selalu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Para pengkritisi kebijakan ini, mayoritas berasal dari pengamat politik, akademisi, dan organisasi masyarakat yang memang selalu memantau kinerja DPR dan anggotanya. Pada bulan November 2010, polemik ini memanasi seiring kunjungan kerja DPR RI ke berbagai negara. Diantaranya yang cukup mendapatkan kritikan pedas dari masyarakat adalah kunjungan Badan Kehormatan (BK) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BK Nudirman Munir ke Yunani.

Kritikan tidak hanya mengenai substansi kunjungan, yaitu untuk mempelajari etika politik ke negara yang dulunya merupakan sumber etika politik, tapi juga mengenai kegiatan sampingan yang dilakukan anggota seperti pelesiran dan “konon” menonton tarian perut. Mengenai yang terakhir ini, anggota DPR yang melakukan perjalanan membantah keras. Namun, hal ini tidak mengurangi bobot kritikan masyarakat tentang faedah kunjungan tersebut.

Anggaran

Kunjungan kerja anggota DPR memang sudah selalu dianggarkan dalam APBN sebagaimana yang dijelaskan oleh Anis Matta selaku Wakil Ketua DPR RI. Menurut Anis, kunjungan kerja merupakan bagian dari proses legislasi yang merupakan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Dalam melakukan proses legislasi tersebut, anggota DPR memerlukan semacam *benchmarking* dengan meniru dan membandingkan produk legislasi dari negara yang dikunjungi.

Proses *benchmarking* ini terlepas dari berfaedah atau tidak selalu didukung oleh anggaran yang cukup dan bahkan bertambah dari tahun ketahun. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), untuk tahun 2010 saja, dalam APBN dianggarkan sebanyak Rp. 122 miliar kemudian membengkak menjadi Rp. 170 miliar setelah mengalami penambahan dalam APBN Perubahan sebanyak Rp. 48 miliar.

Berikut perbandingan antara APBN 2010 dan APBN Perubahan 2010 yang bersumber dari Vivanews.com (Sekretariat Nasional FITRA diolah dari DIPA 2010)

Alokasi anggaran kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri dalam APBN 2010

1. Kunjungan dalam rangka Delegasi	Rp 7.557.240.000
2. Kunjungan dalam Rangka Hubungan Bilateral	Rp 6.683.470.000
3. Kunjungan kerja Per Komisi dan Lembaga	Rp 103.712.036.000
4. Kunjungan kerja Pertemuan Regional	Rp 4.139.050.000
Total	Rp 122.091.796.000

Alokasi anggaran tambahan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri dalam APBN Perubahan 2010

1. Kunjungan Kerja LN Dalam penetapan RUU	Rp 23.208.315.000
2. Komisi IV	Rp 3.131.150.000
3. Komisi VI	Rp 3.131.150.000
4. Komisi VI (Pembentukan RUU)	Rp 2.007.820.000
5. Komisi VII	Rp 2.833.730.000
6. Komisi VII (Pembentukan RUU)	Rp 8.809.690.000
7. Kunjungan Kerja Luar negeri Grup Kerja Sama Bilateral	Rp 3.380.200.000
Total	Rp 48.259.788.000

Pertambahan anggaran untuk kunjungan kerja ini sesungguhnya tidak didasari oleh kebutuhan mendasar atau kegentingan dalam proses legislasi. Pertambahan anggaran disebabkan oleh bertambahnya negara tujuan *benchmarking* dari satu negara menjadi dua negara dalam rangka penetapan 13 Rancangan Undang-undang (RUU). Bahkan ada satu RUU yang membuat DPR melakukan kunjungan ke tiga negara.

Alasan ini tentunya membuat kita merasa miris karena berdasarkan logika sederhana banyak hal yang bisa dilakukan anggota DPR dalam proses *benchmarking*, seperti mendatangkan *well informed people* atau ahli yang menguasai materi proses legislasi tersebut.

Mengunjungi dua hingga tiga negara untuk satu RUU dengan gamblang memperlihatkan bahwa anggota DPR tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan fungsi legislasi. Kecuali bila memang kunjungan kerja hanyalah merupakan bungkus yang manis untuk melakukan plesir keluar negeri.

Faedah

Dalam alokasi anggaran 2010 ini, kunjungan anggota DPR ke luar negeri dijadwalkan sebanyak 58 kali kunjungan di 20 negara, yaitu Afrika Selatan, Mexico, Korea utara, China (2 kali), Suriah (7 kali),

Qatar, Australia, Vietnam (3 kali), Philipina, Iran, Turki, Kuwait, Belgia, Singapura, Korea Selatan, Uganda/Mali, Bangkok (2 kali), Venezuela, serta Amerika Serikat (8 kali).

Kunjungan ke Afrika Selatan dilakukan oleh Komisi X untuk melakukan *benchmarking* terhadap pramuka yang ada di sana. Komisi VIII mengunjungi Amerika Serikat untuk mempelajari berbagai hal terkait toleransi dan kesejahteraan masyarakat.

Komisi XI akan mengunjungi 4 negara, yaitu Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, dalam rangka menyelesaikan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Sementara, BK DPR mengunjungi Yunani untuk belajar etika.

Berdasarkan data-data di atas, banyak hal yang bermasalah terkait tujuan awal sebagai *benchmarking*. Banyak hal yang bisa diperdebatkan di situ, seperti apa faedahnya belajar pramuka hingga ke Afrika Selatan? Kunjungan BK ke Yunani, apakah relevansi antara etika politik dengan kondisi kekinian Yunani?

Kondisi politik di Yunani saat ini tergolong tidak dalam kondisi yang dirasa pantas untuk ditiru dalam hal etika politik. Beberapa waktu lalu, Yunani diramaikan oleh demonstrasi masyarakat yang tidak puas atas kinerja pemerintah dan seringkali berujung kerusuhan. Bahkan, Yunani juga mendapat predikat negara Eropa terkorup di Eropa.

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa, faedah yang dinilai masyarakat dari kunjungan anggota DPR tidaklah imbang dengan dana yang menghabiskan hingga Rp. 170 Milyar setahun. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya mulai memikirkan jalan keluar dalam persoalan ini antara lain dengan melibatkan ahli-ahli pemerintahan, ahli konstitusi yang begitu banyak dimiliki Indonesia dan tentu saja menguasai berbagai hal terkait legislasi dan pemerintahan.

Akhir kata, persoalan ini tidak hanya berhenti pada kritikan soal anggaran dan faedah semata. Tapi lebih daripada itu menyangkut rasa malu yang dimiliki oleh DPR dan anggotanya terkait citra DPR yang tidak membaik dari tahun ke tahun. Sebagai anak bangsa, tentu kita ingin memiliki parlemen yang diisi wakil rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat dan bukan yang dikonotasikan dengan penghisap rakyat.

Persoalan ini tidak hanya berhenti pada kritikan soal anggaran dan faedah semata. Tapi lebih daripada itu menyangkut rasa malu yang dimiliki oleh DPR dan anggotanya terkait citra DPR yang tidak membaik dari tahun ke tahun. Sebagai anak bangsa, tentu kita ingin memiliki parlemen yang diisi wakil rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat dan bukan yang dikonotasikan dengan penghisap rakyat.

— **Benni Inayatullah** —

Menata Ulang Koalisi: Golkar Keluar, PDI-P Masuk, Mungkinkah?

Wacana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu dan peluang koalisi Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai hangat lagi. Penandanya cukup jelas, berawal dari pernyataan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul bahwa menteri-menteri dari Partai Golkar akan *direshuffle*, dan diganti kader PDI-P.

Meskipun Megawati kerap menegaskan bahwa koalisi antara kedua partai itu kecil kemungkinan terwujud, bahkan tidak mungkin terjadi. Namun, peluang ini masih tetap terbuka. Jika dilihat dari beberapa pernyataan beberapa petinggi PDI-P, seperti Taufiq Kiemas, Puan Maharani, Tjahjo Kumulo, dan Pramono Anung, maka koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-P bukan tidak mungkin akan terwujud. Taufiq Kiemas misalnya, kerap melontarkan pernyataan “bersahabat” dengan pemerintah dan memberi sinyal tentang kemungkinan PDI-P bergabung di pemerintahan.

Isue akan adanya *reshuffle* kabinet tampaknya akan semakin hangat di akhir tahun ini. Pertanyaannya, siapa saja yang berkepentingan dengan penggelindingan isu *reshuffle*? Lalu, mengapa Golkar perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi bahkan dikeluarkan dari koalisi, dan apa keuntungannya bagi PDI-P jika masuk dalam pemerintahan?

Empat perspektif

Penggelindingan isu *reshuffle* paling tidak dapat dibaca dalam empat perspektif politik. *Pertama*, dari perspektif kepentingan partai-partai mitra koalisi. Isu *reshuffle* sengaja dihembuskan untuk memperkuat posisi tawar dengan presiden. Berdasarkan pengalaman lima tahun lalu misalnya, isu *reshuffle* kerap dijadikan sebagai alat bagi partai-partai mitra koalisi untuk melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik dengan presiden.

Kedua, dari perspektif kepentingan pemerintah (presiden), *reshuffle* juga dapat dibaca sebagai strategi pengalihan isu. Dalam hal ini, isu *reshuffle* berpotensi dijadikan sebagai pengalihan berbagai isu dan persoalan yang tak kunjung terselesaikan oleh pemerintah belakangan ini.

Ketiga, isu *reshuffle* kabinet juga dapat dilihat dari perspektif kepentingan internal *the ruling party* (Partai Demokrat). Di balik isu *reshuffle* sangat mungkin ada kepentingan Partai Demokrat atau kepentingan “faksi politik” di internal Demokrat. Karena itu, isu *reshuffle* boleh jadi justru sengaja dihembuskan Partai Demokrat sendiri. Implikasi dari menguatnya faksionalisme politik di internal Demokrat maupun kepentingan Partai Demokrat secara institusi untuk menambah jatah kursi menteri.

Keempat, isu *reshuffle* juga bisa dilihat dari perspektif kepentingan partai oposisi. PDI-P sejatinya juga berkepentingan untuk masuk ke dalam kabinet untuk melakukan optimalisasi kekuasaan dan memperkuat akses ekonomi politik ke pemerintahan. Apalagi beberapa politisi partai ini juga terancam terjerat masalah hukum.

Manuver Golkar

Partai Golkar, sebagai partai terbesar kedua di parlemen, tentu saja menginginkan menggapai kekuasaan yang lebih optimal. Selama setahun bersama SBY-Boediono, Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) tampaknya memang belum memperoleh itu. Benar bahwa Ketua Umum Golkar menduduki jabatan strategis sekaligus prestisius sebagai ketua harian sekretariat gabungan koalisi.

Namun, Golkar sejatinya tak memiliki ruang manuver yang leluasa dalam memengaruhi kekuasaan pemerintahan. Karena itu pula, beberapa waktu lalu menjelang setahun pemerintahan, muncul aspirasi cukup kuat di kalangan Golkar agar adanya *reshuffle* kabinet, tentunya untuk menambah jatah kursi menteri dan memperluas jangkauan akses penguasaan ekonomi politik di pemerintahan.

Paling tidak bagi Golkar, skenario dan target politik seperti di masa Pemerintahan SBY-Kalla dapat tercapai. Tingkat representasi Golkar di kabinet pada masa itu mengalami grafik naik, kenaikan dari awal pemerintahan (dua kursi menteri) hingga kemudian terjadi dua kali *reshuffle*, menjadi tiga dan kemudian empat kursi menteri.

Apalagi, belakangan ini, kasus “mafia pajak Gayus: yang kerap dikaitkan dengan persoalan pajak beberapa perusahaan Ical yang juga Ketua Umum Partai Golkar berpotensi menyandera Golkar. Pada kondisi seperti ini, sangat mungkin Golkar memperkuat peran politik dua kakinya, berkoalisi di pemerintahan sekaligus memperkuat peran oposisi di parlemen. Di titik inilah, pertimbangan untuk mengeluarkan Golkar dari pemerintah menjadi sangat relevan

dalam rangka menata ulang koalisi dan memperkuat soliditas internal koalisi. Hanya saja kendalanya, apakah SBY memiliki nyali politik yang cukup untuk mengeluarkan Golkar.

Keuntungan PDI-P

Gaya berposisi PDI-P pada periode kedua Pemerintahan SBY relatif lebih “lunak” ketimbang lima tahun sebelumnya. Meskipun Megawati kerap melakukan kritik, tetapi posisi “keras” Megawati itu diimbangi sikap “lunak” TK, dengan menjalankan strategi politik akomodatif dan kompromistik.

Setidaknya, ada tiga alasan sikap ‘oposisi lunak’ PDI-P – apalagi memutuskan masuk ke dalam pemerintahan – berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas partai. *Pertama*, PDI-P cenderung akan dipersepsikan sebagai partai yang konstruktif, akomodatif, dan objektif. Persepsi ini jelas berdampak positif bagi elektabilitas PDI-P di tengah inkonsistensi partai-partai mitra koalisi. Namun, hal ini juga berisiko jika PDI-P dianggap sebaliknya sebagai partai tidak konsisten.

Kedua, sikap ini akan membuka peluang bagi pemilih di luar massa tradisional PDI-P – terutama kelompok pemilih SBY-Boediono yang berasal dari basis massa partai-partai mitra koalisi – untuk memberi dukungan elektoral.

Ketiga, PDI-P akan mendapatkan dampak positif secara elektoral, bukan hanya efek dari menurunnya kepuasan publik terhadap Pemerintah, tetapi juga sebaliknya, imbas dari persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah, seperti halnya dialami Partai Demokrat.

Akhirnya, seandainya SBY akan merombak kabinet, inilah momentum tepat untuk menentukan partai-partai mana yang layak diajak berkoalisi, dan partai mana pula yang pantas dikeluarkan dari pemerintahan. Kita tunggu saja, apakah PDI-P akan masuk pemerintahan, dan SBY memiliki nyali cukup besar untuk mengeluarkan Golkar dari kabinet?

Seandainya SBY akan merombak kabinet, inilah momentum tepat untuk menentukan partai-partai mana yang layak diajak berkoalisi, dan partai mana pula yang pantas dikeluarkan dari pemerintahan.

— **Hanta Yuda AR** —

Manajemen Penanganan Bencana

Indonesia adalah negeri yang rawan bencana. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVG), terdapat 25 daerah wilayah rawan gempa bumi yaitu: Aceh, Sumatera Utara (Simeulue), Sumatera Barat - Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten Pandeglang, Jawa Barat, Bantar Kawung, Yogyakarta, Lasem, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kepulauan Aru, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sangir Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Kepala Burung-Papua Utara, Jayapura, Nabire, Wamena, dan Kalimantan Timur.

Wilayah Kepulauan Indonesia juga terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai Selatan pulau Jawa, lepas pantai Selatan kepulauan Nusa Tenggara, dan berbelok ke arah Utara ke perairan Maluku sebelah Selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Pulau Papua. Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi. Kondisi demikian yang menyebabkan pulau-pulau sekitar pertemuan 3 lempeng itu sering terjadi gempa bumi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Januari-September 2010 mencatat dari total 354 daerah yang rawan bencana, daerah berpotensi tsunami tingkat tinggi sebanyak 175 dan 179 daerah rawan tsunami sedang. Bahkan BNPB mencatat sejak 1629 hingga 2010 ini atau dalam kurun 381 tahun, tsunami sudah terjadi sebanyak 171 kali di Indonesia. Dalam enam tahun terakhir telah tercatat berbagai aktivitas gempa besar di Indonesia. Yaitu Gempa 9,2 SR di Aceh disertai tsunami pada 2004, Gempa 8,7 SR di Nias pada 2005, Gempa 6,3 SR di Yogya pada 2006, Gempa 7,4 SR di Tasik pada 2009, Gempa 7,6 SR di Padang pada 2009, dan Gempa 7,2 SR di Mentawai.

Kondisi rawan bencana ini ternyata belum sepenuhnya dipahami dan menjadi pertimbangan utama dalam setiap upaya pembangunan di Indonesia. Hal ini terbukti dari berbagai pengalaman yang terjadi

pada saat dan setelah bencana, dimana penanganannya cenderung lamban, sehingga jumlah korban menjadi lebih banyak. Indonesia telah berulang kali mengalami bencana di berbagai wilayah, namun berulang kali pula Pemerintah dikritik tentang buruknya manajemen bencana yang dilakukan baik pada tahap tanggap darurat maupun saat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Contoh buruknya manajemen bencana yang dilakukan Pemerintah adalah pada peristiwa bencana gempa bumi di Sumatera Barat pada September 2009, lalu banjir bandang di Wasior Papua, kemudian penanganan bencana tsunami di Kepulauan Mentawai yang berbarengan dengan bencana meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Penanganan gempa Sumatera Barat dinilai tidak sistematis. Akibatnya, proses evakuasi terhadap korban lambat, distribusi bantuan tidak merata, daerah terisolasi tak tersentuh, data korban simpang siur, dan sejumlah persoalan lainnya. Berbagai kelemahan ini antara lain karena kepala daerah yang seharusnya juga selaku pemegang kekuasaan dan komando tertinggi di daerah tidak pernah dilatih manajemen bencana, baik prabencana, tanggap darurat (ketika bencana terjadi), maupun pascabencana. Kebijakan kepala daerah lebih bersifat reaktif dan tidak berdasarkan pada pengetahuan manajerial bencana. Untuk tanggap darurat, misalnya, kepala daerah tidak pernah dilatih soal prosedur distribusi bantuan, prosedur evakuasi korban, penanganan pengungsi, penanganan kesehatan korban, koordinasi antarinstitusi, dan lainnya.

Problem sejenis berulang pada penanganan bencana di Wasior, Mentawai dan lereng Merapi. Korban bencana di Wasior harus menunggu berhari-hari untuk menunggu bantuan tiba. Para pengungsi di lereng Merapi juga bernasib sama. Meskipun mereka berdiam di Pulau Jawa yang menjadi pusat negara ini ternyata penanganan nasib para pengungsi masih jauh dari gambaran ideal. Pemerintah terlihat sangat kedodoran untuk ketika harus mengurus ratusan ribu pengungsi dalam waktu yang begitu sempit dan keterbatasan infrastruktur pengungsian.

Tragedi Mentawai secara jelas menunjukkan betapa pemerintah tidak serius melindungi rakyat dari malapetaka. Semua orang tahu bahwa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami sulit diprediksi, apalagi dicegah. Tapi korban jiwa mungkin tidak akan sebanyak sekarang jika pemerintah sungguh-sungguh membangun sistem peringatan dini. Tsunami ini datang setelah gempa berkekuatan 7,2 pada skala Richter mengguncang Mentawai dan daratan Sumatera.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memang mengirim peringatan tentang kemungkinan adanya tsunami, yang disiarkan oleh sejumlah televisi. Masalahnya, tidak semua warga Mentawai saat itu sedang menonton televisi. Kalaupun menonton, belum tentu pula mereka menyadari adanya bahaya dan kemudian menyelamatkan diri. Itulah kelalaian baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah tidak mempersiapkan rakyat untuk menyelamatkan diri ketika bahaya datang. Bahkan pemerintah juga tidak menyediakan sistem peringatan yang bisa dipahami secara mudah dan cepat oleh masyarakat. Para pejabat seolah tidak pernah belajar dari bencana tsunami yang meluluhlantakkan Aceh pada 2004.

Memang, pemerintah pernah memasang *buoy* atau peralatan deteksi tsunami di perairan itu. Sayangnya, jumlahnya kelewat minim, tidak memadai untuk memantau pesisir Aceh, Nias, Mentawai, hingga Padang. Sebagian *buoy* bantuan Jerman ini cuma jadi pajangan karena tidak terhubung dengan satelit yang bisa mengirim pesan lewat sirene secara otomatis. Para nelayan memperparah keadaan dengan mencuri atau mempreteli peralatan pendeteksi tsunami itu.

Tragedi Mentawai seharusnya melecut pemerintah mengevaluasi semua sistem peringatan dini, terutama di daerah pesisir barat Sumatera. Sejak enam tahun lalu, para ilmuwan sudah memperingatkan pemerintah bahwa kawasan ini rawan gempa dan tsunami. Di wilayah ini diperkirakan akan ada gempa besar yang selalu berulang setiap 200 sampai 300 tahun karena lempeng kulit bumi di sana saling menghunjam dan sewaktu-waktu bisa patah.

Harus diakui, membangun sistem peringatan dini tsunami untuk melindungi seluruh rakyat di negeri ini tidak hanya pelik, tapi juga mahal. Sebuah *buoy* saja harganya Rp 4,2 miliar. Namun biaya ini tak ada artinya bila dibandingkan dengan nyawa penduduk. Lagi pula, melindungi rakyat merupakan fungsi utama negara, hal yang justru diabaikan oleh pemerintah.

Ke depannya, dalam rangka pembangunan sosial yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan manajemen bencana yang relevan. Yakni manajemen bencana yang dapat memberdayakan masyarakat korban bencana dan memulihkan keterpurukan korban akibat bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan saja dari sisi fisik, namun juga dari sisi sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan kearifan lokal dan berbagai potensi yang ada di setiap wilayah bencana.

Ke depannya, dalam rangka pembangunan sosial yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan manajemen bencana yang relevan. Yakni manajemen bencana yang dapat memberdayakan masyarakat korban bencana dan memulihkan keterpurukan korban akibat bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan saja dari sisi fisik, namun juga dari sisi sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan kearifan lokal dan berbagai potensi yang ada di setiap wilayah bencana.

— Endang Srihadi —



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

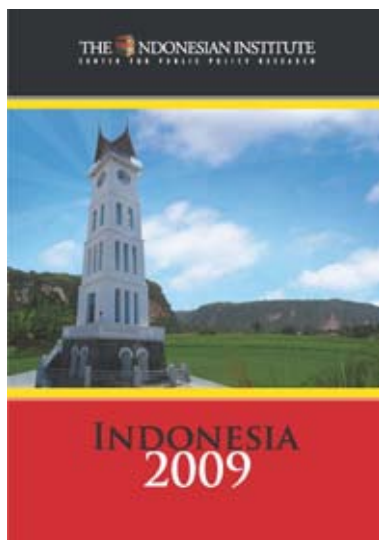
Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Teloh Terbit INDONESIA REPORT 2009

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan kembali publikasi kajian tahunan, **Indonesia 2009** setelah sebelumnya menerbitkan laporan tahunan Indonesia 2005, 2006, 2007, dan 2008. Buku Indonesia 2009 merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, hukum, sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah Indonesia. Indonesia 2009 diterbitkan dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2009. Publikasi tahunan ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.

Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan *think tank* nasional dan internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.



Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2009:

1. Tahun Pemulihan Ekonomi
2. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur
3. Cicak Vs Buaya: Perseteruan Tiga Instansi Penegak Hukum
4. Daur Ulang Otonomi Daerah
5. Politik Indonesia 2009: Partai Politik, Pemilu, Koalisi Pemerintahan dan Prospek Demokrasi
6. Potret dan Kinerja Representasi DPR Baru (2009-2014)
7. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
8. Potret Buram Perlindungan Anak

Tim Penulis:

Adinda Tenriangke Muchtar
 Aly Yusuf
 Antonius Wiwan Koban
 Benni Inayatullah
 Endang Srihadi
 Hanta Yuda AR
 Nawa Poerwana Thalo

Supervisi: Anies Baswedan (Direktur Eksekutif & Riset)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Sdri. Meilya Rahmi / Sdr. Hadi Joko di 021 **3905558**

atau email contact@theindonesianinstitute.com atau theindonesianinstitute@yahoo.com.

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Nawa Poerwana Thalo

Peneliti Bidang Politik

Aly Yusuf, Benni Inayatullah,

Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Harhar, Benang Komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: theindonesianinstitute@yahoo.com

